

**LAPORAN MONEV  
PENGADUAN MASYARAKAT**

**BULAN : JANUARI S.D. JUNI 2020**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2020**

## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga laporan Semester 1 (Januari s.d Juni) diselesaikan. Laporan bulanan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan dalam rangka implementasi penanganan Pengaduan Masyarakat yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Didalamnya memuat hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah., serta memuat hambatan dan permasalahan yang dihadapi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.

Harapan kami kiranya laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan penyelesaian pengaduan masyarakat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan sekaligus sebagai bahan masukan bagi penyusunan laporan pelaksanaan tindak lanjut aduan masyarakat pada lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya oleh karena itu saran yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terlaksananya Tindak lanjut penyelesaian aduan masyarakat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. diucapkan terima kasih.

Semarang, 15 Juli 2020

Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Agama Provinsi Jawa Tengah



H. Musta'in Ahmad, S.H., M.H.

## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b> .....	1
<b>Daftar Isi</b> .....	2
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	3
A. Latar Belakang .....	3
B. Tujuan .....	4
C. Ruang Lingkup .....	4
D. Dasar Hukum .....	4
<b>BAB II Pelaksanaan Kegiatan</b> .....	5
1. Penunjukkan Petugas Layanan Aduan .....	5
2. Rekap Pengaduan .....	5
<b>BAB III Analisis dan Pembahasan</b> .....	6
1. Sarana dan Prasarana .....	6
2. Sumberdaya Manusia Pengelola .....	9
3. Regulasi dan Prosedur .....	9
<b>BAB IV Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Sebelumnya</b> .....	10
1. Saran atau Rekomendasi .....	10
2. Tindak Lanjut Hasil Monev .....	10
<b>BAB V Penutup</b> .....	11
A. Kesimpulan .....	11
B. Rekomendasi .....	11

## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang**

Istilah tindak lanjut dalam Pengaduan Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu tindak lanjut sebagai bagian utuh dari pelaksanaan penyelesaian pengaduan masyarakat dan tindak lanjut sebagai tahap akhir dari kegiatan evaluasi. Istilah tindak lanjut dalam system penyelesaian Pengaduan Masyarakat dapat dimunculkan sebagai bentuk respon cepat terhadap refleksi yang dilakukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas atas permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi selama pelaksanaan Pengaduan Masyarakat. Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan pada bagian ini adalah tindak lanjut sebagai bagian dari evaluasi Pengaduan Masyarakat.

Tindak lanjut dalam kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan penyelesaian Pengaduan Masyarakat. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini tim pelaksana Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Pimpinan, dapat memikirkan ulang keseluruhan program Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang telah dilaksanakan dengan cara membuat desain ulang atau merevisi seluruh program atau beberapa bagian dari program yang dianggap belum begitu efektif. Jika hasil evaluasi secara keseluruhan disimpulkan baik, maka tindak lanjut dapat dilakukan dalam bentuk pengembangan atau peningkatan program menuju pencapaian tujuan dengan target yang lebih tinggi dan kompleks.

Tindak lanjut pelaksanaan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat akan menjadi alat penting untuk mengambil keputusan apakah program Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang sudah ada akan dilanjutkan atau direvisi, guna meningkatkan program, serta digunakan untuk mendukung perubahan-perubahan dalam sistem lembaga.

Penanganan pelaporan yang berindikasi tindakan pelanggaran hukum/kode etik pegawai/dan tindakan lain tersebut merupakan bagian dari tugas penanganan pengaduan sebagaimana diatur di dalam KMA Nomor 765 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Kementerian Agama.

## **B. Tujuan**

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan penanganan pengaduan pelanggaran baik dari pihak internal maupun eksternal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam rangka menjamin penerapan sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing system) berjalan secara efektif
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan pelanggaran di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas;
3. Mendorong pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yang memiliki informasi dan bukti-bukti tentang indikasi perbuatan pelanggaran untuk melaporkannya secara aman dan bertanggung jawab.

## **C. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup dari laporan ini adalah kegiatan implementasi Whistleblowing System di Kantor kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

## **D. Dasar Hukum**

Dasar hukum implementasi WBS di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas adalah Keputusan Menteri Agama Nomor: 765 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing pada Kementerian Agama.

**BAB II**  
**Pelaksanaan Kegiatan**

**1. Penunjukan Petugas Layanan Pengaduan**

Telah dilakukan penunjukan petugas pengelola layanan pengaduan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2020

**2. Rekap Pengaduan**

Rekap data pengaduan dilakukan setiap bulan, baik ada maupun tidak ada pengaduan. Pada bulan Juli s.d. Agustus 2020 tidak terdapat pelaporan atas pelanggaran yang dilakukan pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Adapun rekap data pengaduan pada setiap bulan adalah sebagaimana terlampir:

<b>MATRIK PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN DAN ADUAN MASYARAKAT</b>										
<b>PADA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH</b>										
<b>BULAN JANUARI – JUNI TAHUN 2020</b>										
NO	BULAN	KAB/KOTA	ASAL SURAT/PELAPOR	TERLAPO R	ISI DUMAS	STATUS LAP				KET/REKOMENDASI
						P-21			L	
						T B	T B S	T T		
1	06/01/2020	Kab. Demak	Kakankemenag Kab. Demak	M. Badri (MTsN 1 Demak)	Pelanggaran Disiplin Tidak Masuk Kerja dan Tidak masuk Kerja	√				Selesai, rekomendasi Hukuman sudah di kirim ke Pusat
2	11/11/2019	Grobogan	Kankemenag Kab. Grobogan	Atta Fauzi, Pengadmi nistrasi KUA Wirosari	Pelanggaran Disiplin Tidak Masuk Kerja dan Tidak masuk Kerja	√				Selesai, rekomendasi Hukuman sudah di kirim ke Pusat
3	20/01/2020	Kab. Temanggung	Sumaryanto Jamal, Jainudin	Drs. Saefudin, Kakankemenag Kab Temanggung	Pelanggaran Disiplin Mall Administrasi	√				Selesai, rekomendasi Hukuman sudah di kirim ke Pusat
				Agus Latif, Kasubbag TU	Pelanggaran Disiplin Mall	√				Selesai, Hukdis sudah dijatuhkan

					Administra si					
4	28/01/ 2020	Kab Boyolali	Media Massa/Elekt ronik	Kepala KUA Teras	Pelayanan KUA yang tidak memuaska n masyaraka t	√				Selesai, Pembinaan Kakankemen ag
5	11/02/ 2020	Kota Semara ng	Para Guru/Karya wan MTsN 1 Kota Semarang	H. Asroni (Kepala MTsN 1 Kota Semarang)	Pelanggar an Disiplin terkait Kinerja/ Manajeme n Kepala Madrasah			√		Selesai, tidak cukup alat bukti terjadinya pelanggaran
6	17/01/ 2020	Kab. Banyum as	Masyarakat Peduli Kemenag	Kepala Kankemen ag Banyumas	Penyalah gunaan wewenang dan Mal Administra si			√		Selesai, tidak cukup alat bukti terjadinya pelanggaran
7	05/03/ 2020	Kab. Semara ng	Anonimous	Dr. Hidayatun, S.Ag, M.Pd (Kepala MTsN Susukan Kab Semarang)	Dugaan Pengguna an Dana Bos dan Komite yang tidak sesuai			√		Selesai, tidak cukup alat bukti terjadinya pelanggaran
8	17/03/ 2021	Kab. Wonogir i	Kakankeme nag Kab. Wonogiri	M. Baderi (Pengawas Madrasah)	Dugaan pelanggar an Etika terkait perbuatan Nikah Sirri	√				Selesai, rekomendasi Hukuman sudah di kirim ke Pusat
9	04/03/ 2020	Kab. Jepara	Nurudin	Zaenudin, Kepala MIN 1 Jepara	Tindakan perselingk uhan			√		Selesai, tidak cukup alat bukti terjadinya pelanggaran dan sudah dilakukan pembinaan
10	08/02/ 2020	Kab. Wonogir i	Titis. S	Aris Suryanto, S.Ag. M.SI (Kepala MIN 1 Wonogiri)	Dugaan Penyalah gunaan Pengguna an Dana Komite yang tidak sesuai			√		Selesai, rekomendasi Hukuman sudah di kirim ke Pusat
11	02/03/ 2020	Kab. Temang gung	Monaroh	Saefudin, Kakankem enag	Dugaan Penyalahg unaan			√		Selesai, rekomendasi Hukuman

				Temanggung	Kewenangan dan Mal Administrasi					sudah di kirim ke Pusat
				Agus Latif, Kasubbag TU	Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dan Mal Administrasi	√				Selesai, rekomendasi Hukuman Disiplin sudah dijatuhkan
				Eko Widodo, Kasi PHU	Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dan Mal Administrasi	√				Selesai, rekomendasi Hukuman Disiplin sudah dijatuhkan
				Iskandar, JFU Seksi PHU	Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dan Mal Administrasi	√				Selesai, rekomendasi Hukuman Disiplin sudah dijatuhkan
				Hery Kurnia Putra, Bendahara Pengeluaran	Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dan Mal Administrasi	√				Selesai, rekomendasi Hukuman Disiplin sudah dijatuhkan
				Ulumudin, JFU subbag Umum	Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dan Pungutan liar	√				Selesai, rekomendasi Hukuman Disiplin sudah dijatuhkan
				Wakhidatu Rokhimatun Solikhah, JFU Seksi PD Pontren	Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dan Pungutan liar	√				Selesai, rekomendasi Hukuman Disiplin sudah dijatuhkan
12	17/03/2020	Kab. Wonosobo	Mukhottob dkk	Totok Jumantoro, M.Ag (Kasi Penma	Dugaan pungutan liar dilingkungan		√			Proses, dalam menunggu jawaban dari Irjen



				Kankemen ag Kab. Wonosobo	Madrasah					
13	01/04/ 2020	Kota Semara ng	Lapor Dumas.com	Pembimas Kristen	Adanya kegiatan massa di GKJ Injil Kerajaan Marina	√				Sudah di selesaikan oleh Pembimas Kristen
14	02/04/ 2020	Kab. Klaten	Tenaga Pendidik MAN 03 Klaten	Masrukhin Prihatno (Ka Urusan TU MAN 03 Klaten)	Dugaan pungutan liar kepada CPNS di MAN 03 Klaten	√				Selesai, rekomendasi Hukuman sudah di kirim ke Pusat
15	21/03/ 2020	Kab. Klaten	Mudhakhir	Kepala MAN 02 Klaten	Dugaan Pelanggar an Kinerja Kepala Madrasah			√		Selesai, tidak cukup alat bukti terjadinya pelanggaran
16	15/04/ 2020	Kab. Banyum as	Tidak Jelas	Tidak Jelas	Tidak jelas					Tidak ditindak lanjuti karena materi aduan tidak jelas dan tidak ada kejelasan pihak Terlapor
17	24/04/ 20	Kab. Banjarn egara	Korban dan Pecinta Kementeria n agama	Kepala Kankemen ag Banjarneg ara	Mall Administra si seleksi Penyuluh Honoror			√		Selesai, tidak cukup alat bukti terjadinya pelanggaran
18	20/05/ 2020	Kab. Batang	Subarsono	Urifah (Guru MI Islam Kalangson o Subah Batang)	Dugaan pelanggar an Etika terkait perbuatan perselingk uhan	√				Selesai, rekomendasi Hukuman sudah di kirim ke Pusat
19	22/06/ 2020	Kab. Purbalin gga	Anonimous	Kakankem enag Kab. Purbalingg a	Dugaan keikutserta an kegiatan Politik dalam Pilkada			√		Selesai, tidak cukup alat bukti terjadinya pelanggaran
20	16/06/ 2020	Kab. Demak	M. Talkhis	Imamul Huda (Kepala MI Al- Maftuhah)	Dugaan pelanggar an Disiplin berupa Perzinaha n	√				Selesai, rekomendasi Hukuman sudah di kirim ke Pusat

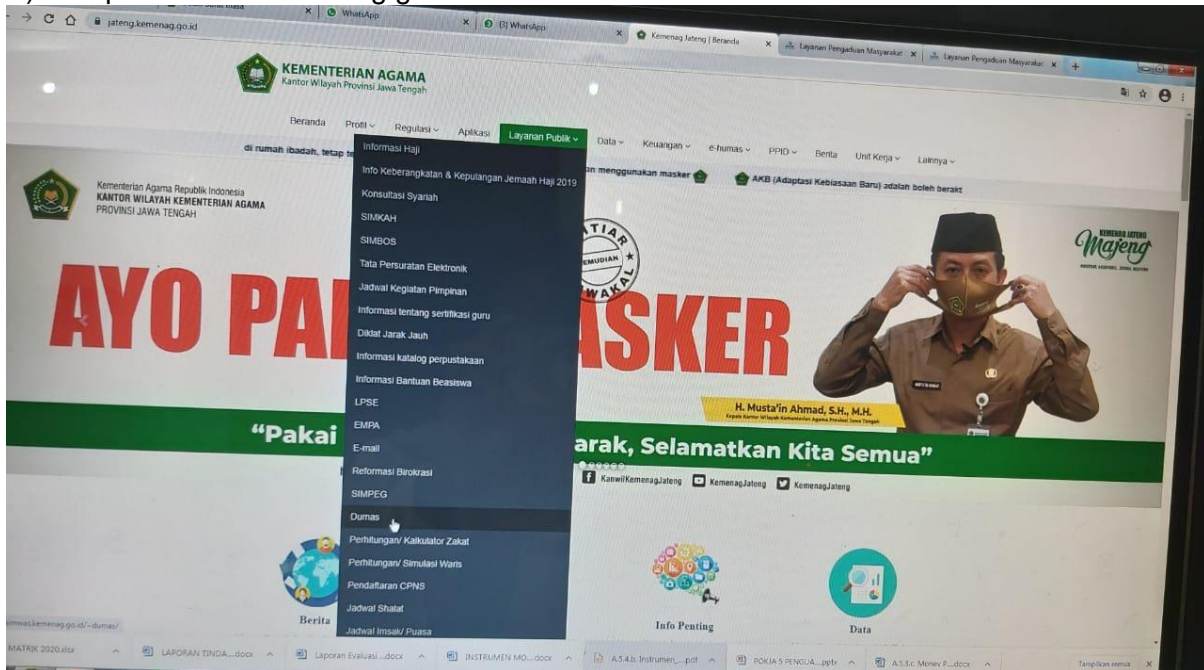
		Kab. Demak	M. Talkhis	Nur Said (Kepala MI Nahdlotus Syubban Sayung)	Dugaan pelanggaran Disiplin berupa Perzinahan	√				Selesai, rekomendasi Hukuman sudah di kirim ke Pusat
--	--	------------	------------	---	---	---	--	--	--	--

## BAB III Analisis dan Pembahasan

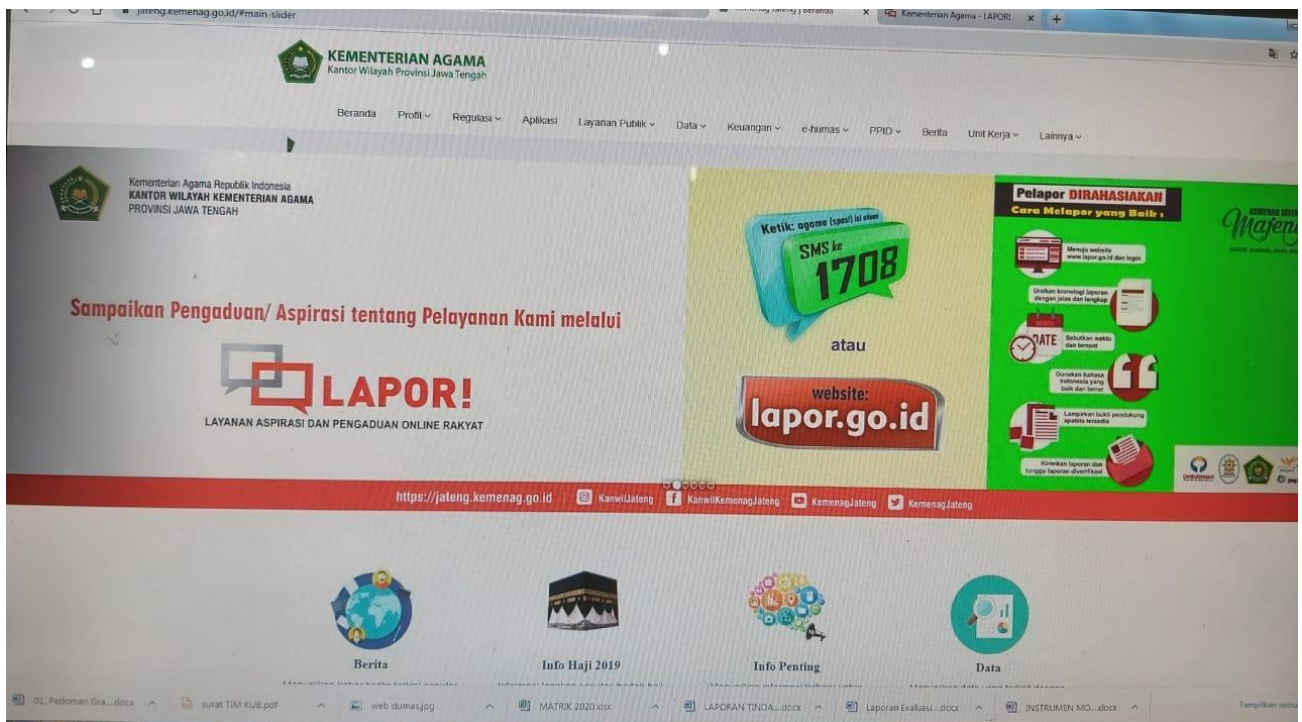
### 1. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana yang disediakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah bagi yang akan menyampaikan pengaduan melalui:

1). <https://simwas.kemenag.go.id/~dumas/>



2) [Lapor.go.id](https://lapor.go.id)



3) Meja Dumas di Pawon RB Kanwil Kemenag Prov. Jateng



## **2. Sumberdaya Manusia Pengelola**

Tim pengelola Pengaduan Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 cukup kompeten dalam menangani pengaduan karena sudah pernah mengikuti internalisasi/sosialisasi regulasi penanganan pengaduan masyarakat.

## **3. Regulasi dan Prosedur**

Dalam penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah telah diterapkan regulasi baru yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor 765 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Kementerian Agama.

## **BAB IV**

### **Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Sebelumnya**

#### **1. Saran atau Rekomendasi**

Adanya reposisi melalui mutasi internal di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah , petugas (operator) aplikasi layanan pengaduan perlu dilakukan penambahan atau penyegaran agar penanganan pengaduan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

#### **2. Tindak Lanjut Hasil Monev**

Telah dilakukan pencatatan, pembukuan dan pelaporan terhadap Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat.

## **BAB V**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

1. di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan penanganan pengaduan masyarakat dan dalam pelaksanaannya tidak ada laporan adanya pelanggaran yang dilakukan pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, melainkan laporan dari Kabupaten/kota.
2. Tim pengelola di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan tindak lanjut dumas sampai pada tingkat rekomendasi hukuman berdasarkan peraturan yang berlaku.

#### **B. Rekomendasi**

Adanya sosialisasi secara berkala perihal regulasi penanganan pengaduan masyarakat di seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.